

SIARAN PERS !!!

Pj. Bupati Bondowoso, Muhamad Hado Wawan Guntoro, S.STP.,M.Si.,CIPA, menghadiri Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, di Ruang Hayam Wuruk Lt. 8 Kantor Setda Prov. Jatim, Senin (18/11/2024).

Dalam Rakor tersebut, hadir pula Pj. Gubernur, Adhy Karyono, yang menjelaskan tentang Regulasi Baru Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sebagai solusi untuk lebih tegas dalam mengatasi mafia tanah.

Perubahan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 menjadi Perpres Nomor 62 Tahun 2023 ini memiliki terobosan yaitu pembentukan Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional dan Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria, Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 ini, guna memastikan dan mengevaluasi kembali apa yang menjadi kebijakan dalam perubahan Perpres ini.

Pj. Gubernur Jatim menegaskan, sesuai dengan perubahan tersebut, keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) ditambah dari unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia, yang menjadi anggota Satuan Tugas (Satgas) Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) sekaligus Satgas Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria dan Penataan Akses.

Menindaklanjuti aturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/154/kpts/013/2024 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur.

Pj. Gubernur sudah memperbaiki Pergubnya. Bahwa ini langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tanah, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL dan redistribusi tanah. Sekarang di tim kami sudah melibatkan Kodam V/Brawijaya, Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Sebagian kabupaten/kota memang sudah memperbaiki dan menyesuaikan dengan Pergub dan Perpres, namun sebagian lain belum, jadi di rapat kali ini, Pj. Gubernur meminta kepada mereka untuk menyesuaikan karena kebijakan presiden yang baru ini sangat kuat untuk bisa menyelesaikan persoalan, dan akan melakukan penegakan hukum yang luar biasa bagi mafia-mafia tanah.

Lebih jauh, Adhy menerangkan, dirinya berharap bahwa penyelesaian sengketa dan masalah tanah bisa terintegrasi dalam satu satuan tugas. Sehingga, akan lebih efektif kinerja dan hasilnya dirasakan oleh rakyat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Bondowoso

Ghozal Rawan